

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERAN DAN KEDUDUKAN JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER DALAM PERKARA KONEKSITAS

Amabel Shahab Maleakhi Panjaitan (2210622052), Agus Surono, Handar
Subhandi Bakhtiar

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menguraikan kekuasaan penuntutan negara yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagai Jaksa Agung (*dominus litis*), Jaksa Agung memegang peran ini. Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa Irjen bertanggung jawab kepada Jaksa Agung sebagai *dominus litis* untuk melaksanakan penuntutan dalam pengaturan peradilan militer, juga mencerminkan hal tersebut. Kendati demikian, dalam praktiknya Oditur sering kali tidak melaporkan pelaksanaan penuntutan perkara pidana militer yang ditanganinya kepada Jaksa Agung dengan demikian belum mungkin untuk menerapkan kebijakan penuntutan satu atap (sistem satu atap) secara kohesif. Di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Militer (Jampidmil) dibentuk mengingat berbagai situasi yang disebutkan di atas. Deskripsi ini menginformasikan rumusan permasalahan yang penulis selidiki, yaitu: 1) Dalam kasus terkait, apa peran dan posisi Wakil Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Militer? 2) Bagaimana penunjukan Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Militer mempengaruhi kasus-kasus yang memiliki koneksi?. Penelitian yuridis normatif yang dikombinasikan dengan penelitian deskriptif adalah metodologi yang digunakan. Metode pengumpulan data utama adalah analisis dokumen. Berdasarkan temuan studi, dapat dikatakan jika Jampidmil berfungsi sebagai bagian dari asisten Kejaksaan Agung dalam menjalankan tanggung jawab dan wewenang Kejaksaan di bidang penanganan kasus konektivitas dan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Kehadiran Jampidmil berimplikasi pada upaya pengentasan isu disparitas dan dualisme penuntutan serta mengusahakan terlaksananya efektivitas, efisiensi, serta transparansi dalam proses penanganan perkara koneksitas.

Kata Kunci: jaksa agung bidang pidana militer, koneksitas, dominus litis, single prosecution system.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE ROLE AND POSITION OF THE YOUNG ATTORNEY GENERAL FOR MILITARY CRIMES IN THE CASE OF CONNEXITY

Amabel Shahab Maleakhi Panjaitan (2210622052), Agus Surono, Handar
Subhandi Bakhtiar

Law Number 16 of 2004, which has been updated with Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, outlines the state prosecutorial powers exercised by the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. As the Attorney General (dominus litis), the Attorney General holds this role. The explanation of Article 57 paragraph (1) of Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts, which states that the Inspector General is responsible to the Attorney General as the dominus litis to carry out prosecutions in military judicial arrangements, also reflects this. However, in practice, the Inspector often does not report the implementation of the prosecution of military criminal cases he handles to the Attorney General, so it is not possible to implement the one-stop prosecution policy (one-stop system) in a cohesive manner. In the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, the Deputy Attorney General for Military Crimes (Jampidmil) was formed in view of the various situations mentioned above. This description informs the formulation of the problems that the author investigates, namely: 1) In related cases, what is the role and position of the Deputy Attorney General for Military Crimes? 2) How does the appointment of the Deputy Attorney General for Military Crimes affect cases that have connections? Normative juridical research combined with descriptive research is the methodology used. The main data collection method is document analysis. Based on the findings of the study, it can be said that Jampidmil functions as part of the Assistant Attorney General's Office in carrying out the responsibilities and authority of the Attorney General's Office in the field of handling connectivity cases and technical coordination of prosecutions carried out by the authorities. The presence of Jampidmil has implications for efforts to alleviate the issue of disparity and dualism in prosecution and strive for effectiveness, efficiency, and transparency in the process of handling connectivity cases.

Keywords: *attorney general for military crimes, connectivity cases, dominus litis, single prosecution system.*